BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi masyarakat atau, yang dikenal sebagai Ormas, merupakan bagian yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan ormas sudah terbentuk sejak lama, contohnya seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah hingga Budi Utomo. Ormas sendiri terbentuk dari orang-orang yang memiliki perasaan dan tujuan yang sama. Selain itu ormas merupakan bentuk aspirasi dan juga partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan bersama dalam hal sosial, politik, ekonomi dan budaya. Keberadaan ormas saat ini diakui sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia, yang tujuan dan fungsinya ormas untuk memperkuat hubungan sosial agar perbedaan tidak menjadi sebuah konflik.

Dalam demokrasi di Indonesia, ormas dibentuk dengan harapan mampu berkontribusi untuk peningkatan kesadaran hukum dan memperkuat solidaritas sosial. Kehadiran ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, baik dengan mendorong partisipasi masyarakat maupun dengan menjaga ketertiban sosial. Ormas yang berjalan sesuai fungsi idealnya dapat menjadi penggerak perubahan positif, penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman.

Di Indonesia perkembangan ormas sangat pesat, terutama pada wilayah Pulau Jawa. Jawa Barat dan Jawa Timur menduduki posisi teratas karena, memiliki ormas sebanyak 832 dan 827. Pertumbuhan ormas ini terus berlanjut hingga 2024, ormas yang telah terdaftar sebanyak 550 ribu ormas. Jawa Timur dan Jawa Barat tetap pada posisi teratas, yaitu 118.129 dan 116.627 (Raka,2025). Peningkatan ormas menunjukkan tingginya minat partisipasi masyarakat terhadap demokrasi. Ormas yang ada di Indonesia juga tergolong beragam, seperti etnis, budaya, agama hingga politik. Hal ini juga tidak terlepas dari beragamnya masyarakat di Indonesia.

Salah satu kota yang memiliki masyarakat beragam di Indonesia adalah Yogyakarta, Kota ini merupakan tempat yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk menempuh pendidikan. Dari data yang termuat di *Kompas.com,* Yogyakarta

masuk ke dalam nominasi kota pelajar terbaik di dunia pada urutan 117 dan urutan pertama untuk di Indonesia (Widjaja & Kasih, 2025). Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi di Yogyakarta menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah ormas di Yogyakarta. Menurut *website* Bakesbangpol DIY yang berjudul SIKRESNO, saat ini Kota Yogyakarta memiliki ormas sebanyak 361(SIKRESNO, n.d.).

Banyaknya jumlah ormas, nyatanya tidak menjamin kenyamanan ataupun keamanan karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua ormas menjalankan peran konstruktif sebagaimana diharapkan. Di Yogyakarta terdapat contoh ormas yang terlibat kasus tawuran. Ormas yang terlibat adalah PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan juga kelompok bola Brajamusti. Tawuran ini terjadi di wilayah Taman Siswa, akibat dari peristiwa ini menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Selain itu terdapat 352 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diamankan. (CNN Indonesia, 2023)

Fenomena yang terjadi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan kenyataan. Ormas yang awalnya dibentuk atas dasar kebutuhan dan tujuan dan kepentingan bersama, berubah menjadi kepentingan sekelompok orang bahkan individu. Dalam situasi ini diperlukan mekanisme kelembagaan untuk mengelola konflik agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Di Indonesia sendiri setiap ormas berada dalam pengawasan Bakesbangpol. Tugas dari Bakesbangpol adalah memperkuat wawasan kebangsaan serta mengawasi aktivitas ormas. Hal ini di harapkan dapat membawa ormas berjalan sesuai tujuan konstitusional dan mendukung ketertiban.

Peran strategis Bakesbangpol juga didukung oleh regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan beserta perubahan-perubahannya(BPK RI, 2013). Undang - Undang Nomor 17 tahun 2013 ini menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap ormas agar tidak menyimpang dari nilai konstitusi, ideologi Pancasila, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi ini pemerintah daerah, termasuk Bakesbangpol Kota Yogyakarta dituntut

untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan masyarakat dalam berorganisasi dan kepentingan menjaga stabilitas sosial-politik di daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, Bakesbangpol memiliki tugas penting dalam melakukan pembinaan terhadap ormas. Tujuan dari tugas ini untuk tetap mengontrol dan mengembalikan ormas sesuai dengan fungsinya. Karena melihat saat ini terjadi tindakan anarkis ataupun premanisme dari berbagai ormas yang tidak sesuai dengan fungsinya. Menurut Thoha (1989), pembinaan merupakan tindakan dengan tujuan untuk menjadi lebih baik seperti, pertumbuhan, peningkatan ataupun kemajuan individu maupun kelompok (Iroth Injilia Prisilia, 2021). Salah satu bentuk dari pembinaan adalah untuk membangun dan meningkatkan kapasitas peserta. Menurut Gridle (1997), yaitu pembangunan kapasitas merupakan salah satu cara untuk menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan zaman (Haryono et al., 2012)

Pada penelitian terdahulu yang juga meneliti mengenai ormas dan Bakesbangpol, cenderung meneliti mengenai pengawasan dan peranan dalam pembinaan. Hal ini karena pengawasan dan juga pembinaan ormas juga menjadi bagian penting dalam tugas Bakesbangpol. Selain penelitian mengenai pengawasan di Bakesbangpol Yogyakarta juga telah dilakukan. Maka penelitian ini berfokus dalam proses pembinaan, terutama apa saja kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Bakesbangpol kepada ormas di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini penting karena secara akademis dapat memperkaya kajian sosiologi politik terkait implementasi kegiatan pembinaan dan juga pembangunan kapasitas organisasi kemasyarakatan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek regulasi dan pengawasan administratif, sedangkan untuk penelitian ini menambahkan dimensi implementasi kebijakan yang nyata di lapangan dengan konteks lokal Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan berikut.

1. Apa saja kegiatan pembinaan yang dilakukan Bakesbangpol Kota Yogyakarta untuk ormas?

1.3. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pengelolaan organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin berkembang seiring meningkatnya fenomena konflik sosial di berbagai daerah. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Namun pembinaan ormas masih menghadapi berbagai tantangan yang berbeda di setiap daerahnya. Kajian pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada sejumlah literatur ilmiah untuk lebih memahami berbagai kegiatan Bakesbangpol dalam mengelola ormas.

Salah satu referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analisis Peran Bakesbangpol dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sragen* oleh Gumelar & Winduro (2024). Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara pada pihak Bakesbangpol. Melalui penelitian di Sragen menekankan bahwa implementasi kebijakan pembinaan ormas oleh Bakesbangpol lebih dominan bersifat administratif. Mekanisme pengawasan sudah berjalan, namun peran fasilitasi dan pencegahan konflik belum optimal. Pada bagian pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas koordinasi antar instansi.

Kajian lain yang digunakan sebagai literatur adalah *Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan* karya Medellu (2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji mengenai kinerja dari pembinaan yang di lakukan Bakesbangpol. Konsep utama dalam penelitian ini adalah konsep pembinaan, dari

Agus Dwiyanto. Hasil temuan pada penelitian ini diketahui bahwa kurangnya komunikasi antara ormas dan juga Bakesbangpol, dan masalah anggaran juga menjadi faktor kurangya produktivitas dari Bakesbangpol.

Kajian selanjutnya adalah *Peran Bakesbangpol Linmas dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan* Efyanti (2018). Penelitian ini mengkaji mengenai seberapa jauh Bakesbangpol mempengaruhi kesadaran politik pada organisasi masyarakat demi tercapainya demokrasi Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis praktis , dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Kajian ini cukup berbeda dari yang lain, karena menghadirkan perspektif keagamaan dengan menekankan pentingnya pengawasan ormas dalam bingkai nilai-nilai Islam. Peran pemerintah dipandang tidak hanya administratif, tetapi juga normatif-moral. Namun, penelitian ini kurang menyinggung aspek implementasi kebijakan secara teknis di lapangan.

Kajian lain yang digunakan adalah *Analisis Peran Bakesbangpol dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Semarang* oleh Diwanto & Santoso (2025)**.** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, studi ini berfokus pada analisis peran Bakesbangpol dalam melakukan pemberdayaan ormas di Kota Semarang. Penelitian ini menekankan pada hubungan koordinatif antar lembaga dalam pembinaan ormas. Bakesbangpol berperan sebagai mediator antara ormas dan pemerintah. Tantangan yang ditemukan ialah, lemahnya komunikasi dan keterbatasan sumber daya yang sering kali memicu *miskomunikasi* dan potensi konflik horizontal.

Kajian lain yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di daerah Istimewa Yogyakarta* oleh Khumaeroh (2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi pustaka. Kajian ini tentang peran pemerintah daerah yaitu Bakesbangpol DIY dalam melakukan pembinaan ormas melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Fokus utama penelitian ini adalah fungsi pembinaan, bukan

pencegahan konflik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif dengan mendalami aspek implementasi kebijakan yang kompleks.

Kajian tambahan yang lain adalah *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut* oleh Noor (2022). Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan menarik kesimpulan menggunakan metode eksplanasi variabel**.** Dalam melakukan penelitian di Kabupaten Garut mengenai pembinaan ormas. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan pembinaan. Hasilnya menunjukkan bahwa masih kurang efektif, hal ini dipengaruhi oleh anggaran dan juga SDM di Bakesbangpol sendiri.

Untuk mempermudah dalam menganalisis tinjauan pustaka, peneliti menggunakan tabel tinjauan pustaka. Pada tabel ini tinjauan pustaka akan di kelompokan, mulai dari tahun, peneliti, judul, metode hingga hasil temuan pada penelitian. Dengan adanya tabel ini juga akan mempermudah pembaca untuk melihat tinjauan pustaka pada penelitian ini.

Tabel 1.Tabel Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Temuan
1	Gumelar & Winduro (2024)	" Analisis Peran Bakesbangpol dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sragen"	Kualitatif	Implementasi kebijakan pembinaan ormas oleh Bakesbangpol lebih dominan bersifat administratif. Mekanisme pengawasan sudah berjalan, namun peran fasilitasi dan pencegahan konflik belum optimal
2	Medellu (2023)	"Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Minahasa Selatan"	Metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara.	Hasil temuan pada penelitian ini diketahui bahwa kurangnya komunikasi antara ormas dan juga Bakesbangpol, dan masalah anggaran juga menjadi faktor kuranya produktivitas dari Bakesbangpol.
3	Efyanti (2018)	"Peran Bakesbangpol Linmas dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan"	Pendekatan yuridis praktis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif.	Menghadirkan perspektif keagamaan dengan menekankan pentingnya pengawasan ormas dalam bingkai nilai-nilai Islam.

4	Diwanto & Santoso. (2025)	"Analisis Peran Bakesbangpol dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Semarang".	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Lemahnya komunikasi dan keterbatasan sumber daya, yang sering kali memicu *miskomunikasi* dan potensi konflik horizontal
5	Khumaeroh (2018)	" Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di daerah Istimewa Yogyakarta."	Metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber.	Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa di satu sisi organisasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan, namun disisi lain juga masih ada organisasi masyarakat yang tindakannya masih belum bisa mematuhi Undang – Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
6	Noor (2022)	"Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut"	Menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menarik kesimpulan menggunakan metode eksplanasi.	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan pembinaan. Hasilnya menunjukkan bahwa masih kurang efektif, hal ini dipengaruhi oleh anggaran dan juga SDM di Bakesbangpol sendiri.

Tabel1 1Tabel Tinajauan Pustaka

Tabel 1 1. Tinjauan Pustaka

1.4. Kerangka Konsep

Pada sub bagian ini peneliti akan menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang digunakan adalah konsep ormas dari Undang-undang No. 17 tahun 2013 dan juga pembinaan menuruth Mangunhardjana(1986).

1.4.1. ORMAS

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 "Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat dengan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila." (BPK RI, 2013). Definisi tersebut menegaskan bahwa ormas adalah organisasi yang lahir dari inisiatif masyarakat yang memiliki tujuan dan keinginan bersama serta berlandaskan UUD 1945. Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kepentingan dan tujuan bersama. Ormas di Indonesia telah ada sebelum orde baru di Indonesia. Ormas juga menjadi mitra pemerintahan dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi administratif dan kelembagaan. Aspirasi dan juga kepentingan ormas menjadi bagian yang penting, di mana unsur ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana Bakesbangpol Kota Yogyakarta dalam mengelola ormas.

1.4.1.1. Aspirasi

Aspirasi merupakan tuntutan yang dari kelompok masyarakat yang ingin diwujudkan melalui proses sosial atau kebijakan publik. Aspirasi biasanya lahir dari pengalaman sosial, kondisi kehidupan, serta kepentingan kolektif yang dirasakan masyarakat, kemudian disalurkan melalui mekanisme partisipasi seperti musyawarah, forum publik, organisasi kemasyarakatan, atau representasi politik. Dalam konteks organisasi masyarakat (ormas), aspirasi menjadi dasar terbentuknya organisasi karena mencerminkan kepentingan dan tujuan bersama yang ingin diperjuangkan. Sumaryadi (2010) aspirasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi Rumasten Iza (2013).

1.4.1.2. Kepentingan

Kepentingan adalah sesuatu yang dianggap penting atau bernilai oleh individu maupun kelompok sehingga mendorong mereka untuk bertindak atau mengambil keputusan tertentu. Kepentingan biasanya berkaitan dengan kebutuhan, tujuan, atau manfaat yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu proses sosial. Dalam konteks organisasi maupun kehidupan masyarakat, kepentingan dapat mempengaruhi perilaku, sikap, serta partisipasi individu dalam berbagai kegiatan. Menurut Max Weber (1978) Kepentingan mendorong tindakan manusia, yaitu di mana cara pandang aktor terhadap dunianya yang akan menentukan arah dan tindakan yang akan di ambil (Sumarti Titi, 2007)

1.4.2. Pembinaan

Pembinaan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan individu ataupun kelompok. Tujuannya agar mampu melakukan fungsi dan tugasnya secara efektif. Dalam organisasi kegiatan pembinaan dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kompetensi dan kinerja pegawai, selain itu pembinaan juga menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pembinaan menurut Mangunhardjana(1986) "Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal – hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal- hal yang belum dimiliki." Pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja. Kegiatan pembinaan yang dilakukan secara terencana, serta berkelanjutan akan berdampak pada kualitas anggota. Selain itu tujuan pembinaan juga akan mempengaruhi anggota dalam beradaptasi terhadap lingkungan kerja. Menurut Mangunhardjana (1986) tujuan pembinaan adalah membantu orang yang menjalaninya , untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan juga akan membantu organisasi yang akan siap dalam perubahan, selain itu membentuk lingkungan yang lebih positif.

Pembinaan sendiri dilakukan dengan tujuan yang beragam, namun tetap berfokus terhadap peningkatan diri individu ataupun kelompok. Dalam menerapkan kegiatan pembinaan Mangunhardjana membuat beberapa pendekatan pada bukunya, pendekatan ini terdiri dari tiga hal yaitu pendekatan informatif, partisipatif dan juga

eksperiensial. Berikut penjelasan pendekatan yang digunakan dari buku Pembinaan: Arti dan Metodenya Mangunhardjana (1986).

1.4.2.1.Pendekatan Informatif

Menurut Mangunhardjana,(1986) pendekatan informatif adalah kegiatan pembinaan yang menyampaikan informasi kepada para peserta. Pendekatan ini dilakukan untuk berbagi informasi ataupun pengalaman kepada peserta yang belum tahu ataupun belum memiliki pengalaman. Dalam kegiatan pembinaan ini hanya fokus terhadap topik -topik yang dibahas, di mana terdapat narasumber yang akan menjelaskan atau memaparkan informasi kepada peserta. Selain itu partisipasi peserta terbatas dalam kegiatan ini, di mana peserta hanya dapat menanyakan hal – hal yang perlu saja. Dalam buku Pembinaan : Arti dan Metodenya contoh kegiatan pendekatan ini seperti ceramah ataupun seminar.

Seminar

Seminar adalah kegiatan di mana semua orang berkumpul untuk membahas suatu pokok permasalahan dari segala segi tekanan yang terjadi (Mangunhardjana,1986). Selain itu adapun seminar menurut *CAPACITY DEVELOPMENT: A UNDP PRIMER ,(2009)*. *"Meetings of a group of students engaged in research or advanced study under the direction of one or more leaders to discuss problems of mutual interest*." Seminar memiliki perbedaan dalam metode pembinaan yang lain, seminar lebih fokus terhadap pemberian informasi melalui materi. Selain itu kegiatan ini bukan kegiatan yang berkelanjutan seperti pelatihan ataupun *mentoring*. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kegiatan teknis, namun memperkuat pemahaman terhadap tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Seminar biasanya dilakukan untuk menambah ilmu dengan narasumber yang membagikan informasi maupun pengalaman. Pada buku Pembinaan : Arti dan Metodenya, seminar masuk pada pendekatan informatif karena seminar hanya berfokus pada pemberian informasi dan juga pengalaman narasumber. Dalam proses pelaksanan seminar diikuti oleh 15- 30 orang, di mana hanya dilakukan 1- 2 jam saja. Berbeda dengan metode pembinaan lain yang membutuhkan waktu cukup lama Mangunhardjana (1986).

1.4.2.1.Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif adalah pembinaan yang dilakukan dengan melibatkan para peserta. Dalam pembinaan kemampuan ataupun keahlian peserta dimanfaatkan. Selain itu dalam pembinaan ini pembina dan juga peserta dapat berkolaborasi. Menurut Mangunhardjana (1986) pembinaan ini merupakan belajar bersama di mana pembina dan juga peserta belajar satu sama lain. Contoh kegiatan ini seperti diskusi kelompok, *workshop.* Partisipasi peserta diutamakan dalam metode pembinaan ini, berbeda dengan metode informatif yang fokus pembinaan untuk memberikan informasi kepada peserta yang mengikuti pembinaan

Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok adalah metode pembinaan partisipatif, karena pembinaan ini melibatkan aktif peserta pembinaan. Menurut Mangunhardjana (1986) "Diskusi kelompok adalah pembicaraan terarah mengenai pokok permasalahan yang menjadi bahan pembinaan." Tujuan dari diskusi kelompok sendiri untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan pendapat mengenai masalah-masalah untuk menemukan penyelesaiannya. Diskusi kelompok umumnya membutuhkan waktu 1-3 jam untuk mendiskusikan topik pembahasan. Kelebihan metode ini peserta pembinaan mengambil bagian dalam menyampaikan pendapat ataupun saran dalam kegiatan diskusi.

1.4.2.1.Pendekatan Eksperiensial

Menurut Mangunhardjana, (1986) pembinaan ekperiensial adalah pembinaan yang melibatkan langsung para peserta pada situasi dan pengalaman dalam bidang yang dijadikan pembinaan. Pembinaan ini cukup berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya di mana pendekatan informatif para peserta cenderung pasif sedangkan pendekatan partisipatif peserta hanya ikut berpartisipasi. Dalam pendekatan ekperiensial juga tidak hanya melibatkan peserta dalam kegiatan pembinaan tapi juga untuk melatih kemampuan para peserta.

A. Pelatihan *(training)*

Training merupakan salah satu metode peningkatan kapasitas yaitu "*Systematic educative process by which one learns new skills." CAPACITY DEVELOPMENT: A UNDP PRIMER (2009)*. Pelatihan berfokus untuk meningkatkan kompetensi teknis, dari anggota. Selain itu kegiatan dengan cara *training* juga membuka kesempatan untuk anggota, agar mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang relevan dengan tugas di pemerintahan. Manfaat lain dari kegiatan ini anggota dapat meningkatkan adaptabilitas terhadap perubahan organisasi. Pelatihan memiliki kesamaan dengan *coaching* dan juga *mentoring*, namun pelatihan lebih cenderung pada skala yang lebih besar, di mana pemandu ataupun pelatih membimbing sekelompok orang ataupun organisasi. Pelatihan ini juga sering dilakukan di berbagai perusahaan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan para karyawan yang akan memulai bekerja, agar terbiasa dengan lingkungan pekerjaan.

B. *Coaching*

Coaching merupakakan bagian dari metode peningkatan kapasitas atau *capacity building*, di mana *coaching* adalah " *A method of directing, instructing and training a person with the aim to achieve some goal or develop specific skills"CAPACITY DEVELOPMENT: A UNDP PRIMER (2009)*. *Coaching* dilakukan untuk membimbing dan meningkatkan kemampuan individu. Dalam melaksanakan kegiatan ini waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama seperti *mentoring*, hal ini karena *coaching* hanya memerlukan beberapa kali pertemuan hingga tujuan tercapai. *Coaching* berfungsi untuk mengarahkan ataupun membimbing dengan cara yang terstruktur ataupun terarah. Manfaat dari kegiatan pembinaan ini dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, terutama pada anggota. Anggota yang dibina dengan baik, akan lebih produktif, selain itu juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik.

C. *Mentoring*

Mentoring juga menjadi bagian dari metode dalam *capacity building*, *mentoring* adalah *"A process for the informal transmission of knowledge, social capital, and the psychosocial support perceived by the recipient as relevant to*

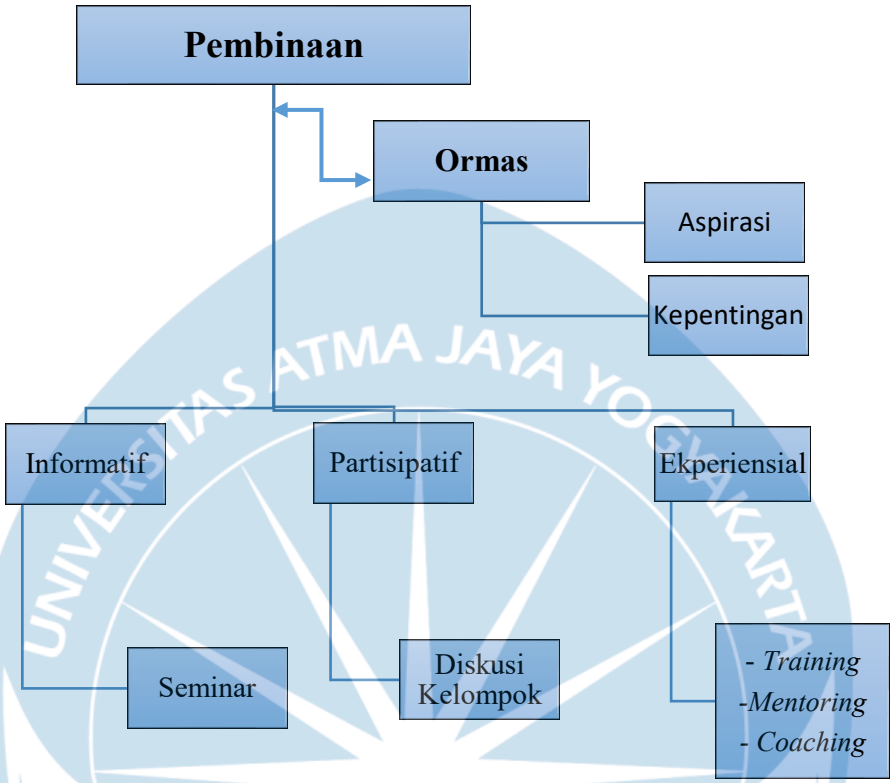
work, career, or professional development" CAPACITY DEVELOPMENT: A UNDP PRIMER (2009) sama halnya dengan *coaching mentoring* merupakan metode *capacity building* dengan durasi yang cukup panjang. Dalam melakukan kegiatan *mentoring* dibutuhkan waktu yang cukup panjang, hingga bertahun - tahun karena *mentoring* bersifat berkelanjutan. Metode ini kerap dianggap sama dengan metode *coaching*, namun ke dua kegiatan ini memiliki struktural yang berbeda. "Pada penelitian *coaching versus mentoring*: *Are there any differences?"* bahwa dua metode pembinaan ini berbeda, dijelaskan bahwa *coaching* dan juga *mentoring* adalah dua aktivitas yang berbeda namun dapat saling mendukung Klofsten & Öberg (2012).

Untuk memperjelas fokus pada penelitian ini, akan di gunakan kerangka berpikir yang telah disusun sesuai dengan konsep yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu kerangka berpikir juga digunakan untuk panduan awal dalam menentukan aspek-aspek yang akan di teliti dan menjaga agar penelitian berada pada batasan masalah yang akan di tetapkan meskipun dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan.

1.5. Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berpikir dalam yang digunakan pada penelitian ini, di mana kerangka berpikir di dapat dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan.

Gambar 1.1.Kerangka Konsep



Kerangka berpikir di atas merupakan susunan dari konsep yang digunakan pada peneliti. Tujuannya untuk memberikan gambaran alur pemikiran dalam penelitian ini dalam menjelaskan hubungan antar konsep dan juga fokus penelitian. Dengan kerangka berpikir akan mempermudah peneliti untuk menganalisis serta mempermudah pembaca untuk memahami alur penelitian.

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan apa saja yang di lakukan Bakesbangpol Kota Yogyakarta untuk Ormas di Kota Yogyakarta. Tujuan utama pada penelitian ini untuk memaparkan dan juga mendeskripsikan kegiatan pembinaan yang dilakukan Bakesbangpol Kota Yogyakarta. Selain itu dalam penelitian ini juga tidak hanya informasi dari Bakesbangpol Kota Yogyakarta yang didapat mengenai kegiatan pembinaan namun juga sudut pandang ormas sebagai pihak yang ikut dalam kegiatan ini. Dan diharapkan dari penelitian ini dapat

berkontribusi dalam ini menambahkan dimensi implementasi kebijakan yang nyata di lapangan dengan konteks lokal Yogyakarta.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini disusun secara sistematis, terarah dan mudah dipahami. Dengan adanya sistematika penulisan peneliti dapat menyusun penelitian sesuai urutan yang logis dan mempermudah para pembaca untuk mengetahui alur dan juga proses penelitian dari awal hingga akhir.

Pada penelitian ini penulisan dimulai dari Bab I yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, kerangka konsep yang digunakan, urutan kerangka dan sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan awalan dari penelitian dan alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan serta apa yang ingin dicapai pada penelitian ini. Lalu Bab II Metodologi Penelitian, bab ini memaparkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya jenis dan juga sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan proses analisis data yang digunakan. Selain itu bab ini juga memaparkan deskripsi subjek, objek penelitian serta alasan memilih narasumber lokasi penelitian.

Bab selanjutnya adalah Bab III Temuan dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan hasil temuan atau data yang didapat melalui wawancara mendalam dengan staf sub-bidang ormas di Bakesbangpol dan juga ketua Ormas HWDI dan ketua ormas Difabel Demokrasi. Data lapangan akan dipaparkan pada bagian temuan dan akan di bahas pada bagian pembahasan menggunakan konsep dan juga tinjauan pustaka yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah Bab IV, pada bagian akhir penelitian berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Setelah pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan tujuan dalam penelitian ini. Pada Bab selanjutnya akan di jelaskan mengenai jenis penelitian, metode yang digunakan, operasionalisasi konsep lalu subjek penelitian teknik pengumpulan serta analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, semuanya akan di jelaskan pada Bab II.